



Masuk tanggal : 12-September-2025, revisi tanggal : 01-10-2025, diterima untuk diterbitkan tanggal : 11-Oktober-2025

## *The Effect of Capital Expenditure and Balancing Funds on Regional Financial Performance Through Regional Original Revenue*

### **Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah**

Philep Njonjie<sup>1</sup>, Agustin Bagu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi, Universitas Halmahera, Tobelo – Halmahera Utara

Email: [njonjie07@gmail.com](mailto:njonjie07@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi Akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo

Email: [agustinbagu018@gmail.com](mailto:agustinbagu018@gmail.com)

#### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of capital expenditure and balancing funds on regional financial performance, with regional original revenue serving as a mediating variable. The research encompasses 12 regencies and 3 cities in the provinces of Maluku and North Maluku. This study employs a quantitative approach utilizing a census sampling method. Secondary data were obtained from the Budget Realization Reports (LRA) published by the Supreme Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia for the period 2020-2023, yielding 60 observational data points. Data analysis was conducted using the Partial Least Square (PLS) method with WarpPLS 8.0 software at a significance level of 5%. Regional financial performance was measured using two key metrics: the effectiveness ratio of regional original revenue and the fiscal decentralization degree ratio. The empirical findings reveal that: (1) Capital expenditure demonstrates a significant positive effect on regional original revenue (coefficient = 0.179;  $p = 0.027$ ); (2) Balancing funds exhibit a significant positive effect on regional original revenue (coefficient = 0.449;  $p < 0.001$ ); (3) Capital expenditure shows a significant positive effect on regional financial performance (coefficient = 0.190;  $p = 0.021$ ); (4) Balancing funds do not significantly affect regional financial performance (coefficient = 0.087;  $p = 0.172$ ); (5) Regional original revenue demonstrates a significant positive effect on regional financial performance (coefficient = 0.870;  $p < 0.001$ ). The study establishes that regional original revenue mediates the relationship between capital expenditure and regional financial performance, as well as the relationship between balancing funds and regional financial performance. These findings indicate that enhancements in capital expenditure and balancing funds can improve regional financial performance through the intermediary mechanism of increasing regional original revenue. The research model demonstrates robust predictive capability with an R-squared value of 75.8% for the regional financial performance variable.*

**Keywords:** *Capital Expenditure, Balancing Fund, Regional Original Revenue, Regional Financial Performance*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel mediasi pada 12 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus untuk menentukan sampel. Data sekunder yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia periode 2020-2023, menghasilkan 60 data observasi. Analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan software WarpPLS 8.0 dan tingkat signifikansi 5%. Kinerja keuangan daerah diukur menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (koefisien = 0,179;  $p = 0,027$ ); (2) Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (koefisien = 0,449;  $p < 0,001$ ); (3) Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (koefisien = 0,190;  $p = 0,021$ ); (4) Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (koefisien = 0,087;  $p = 0,172$ ); (5) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (koefisien = 0,870;  $p < 0,001$ ). Pendapatan asli daerah terbukti memediasi hubungan antara belanja modal dengan kinerja keuangan daerah, serta hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal dan dana perimbangan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah terlebih dahulu. Model penelitian menunjukkan kemampuan prediksi yang kuat dengan R-squared sebesar 75,8% untuk variabel kinerja keuangan daerah.

**Kata Kunci :** Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah

## **Pendahuluan**

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu indikator fundamental dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Nofrita et al., 2024). Dalam konteks otonomi daerah, kinerja keuangan daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, tetapi juga menunjukkan kapasitas daerah dalam menciptakan kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi instrumen penting bagi *stakeholder* untuk mengevaluasi akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan dana publik di tingkat daerah (Santika & Adnyana, 2022).

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mencapai kinerja keuangan yang optimal melalui peningkatan efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan pengelolaan dana perimbangan yang efektif. Kinerja keuangan daerah yang baik idealnya ditandai dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi, rasio efektivitas dan efisiensi yang memadai, serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat (Ronald & Massua, 2022). Harapan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya guna mewujudkan kemakmuran masyarakat lokal.

Namun kenyataan empiris menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal. Data dari Kementerian

Keuangan menunjukkan bahwa mayoritas daerah masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah terhadap total pendapatan daerah (Nurjanah, 2025). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas kinerja keuangan daerah, di mana banyak daerah belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya lokalnya untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Kondisi ini diperparah dengan adanya variasi yang signifikan dalam kinerja keuangan antar daerah, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pencapaian kinerja keuangan daerah.

Secara konseptual, kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks dan saling berinteraksi. Belanja modal merupakan salah satu variabel kunci yang secara teoritis dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan peningkatan daya saing daerah (Wang, 2024). Dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), juga memiliki peran strategis dalam mendukung kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan (Oktavilia et al., 2020). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga dapat berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah secara keseluruhan (Anggih et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan hasil yang beragam. Penelitian Hasibuan et al. (2023) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD. Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Silitonga (2021) menunjukkan bahwa tidak semua komponen belanja modal memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam konteks dana perimbangan, penelitian Widowati et al. (2024) mengidentifikasi bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, namun efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah dalam mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Penelitian Novianti dan Ishak (2022) juga menekankan pentingnya PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah, meskipun perannya sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan keterbatasan studi yang mengintegrasikan belanja modal, dana perimbangan, dan PAD dalam satu model analisis komprehensif. Pentingnya penelitian ini juga didukung oleh urgensi untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan keuangan daerah yang berbasis bukti empiris. Dari perspektif teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang mekanisme transmisi pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah melalui PAD. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya literatur tentang pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah, khususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, diharapkan pula dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah dan mendukung pembangunan wilayah tersebut.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori yang telah berlaku selama ini apakah benar atau salah (Sarmanu, 2017:2). Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian korelasional. Penelitian korelasional ialah penelitian yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi antar variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 12 Kabupaten dan 3 Kota di Maluku dan Maluku Utara. Data yang digunakan adalah Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaporkan oleh 12 Kabupaten dan 3 Kota di Maluku dan Maluku Utara dalam rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Selama periode pengamatan, diperoleh total sampel adalah 15 kabupaten dan kota di provinsi Maluku dan Maluku Utara sehingga data yang dianalisis sebanyak 60 data observasi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

## **Variabel Penelitian**

### **Variabel Independen**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja modal dan dana perimbangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Variabel independen belanja modal ini dapat diukur menggunakan perhitungan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Dana perimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari Dana alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Maka pada penelitian ini Dana Perimbangan diukur dengan rumus sebagai berikut

:

Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah terhadap penggunaan APBD. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan pertumbuhan (Halim, 2004:126). Oleh karena itu pengukuran variabel dependen berupa pertumbuhan kinerja keuangan ini menggunakan 2 rasio yaitu:

### **Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan.

### Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Adapun besaran rasio derajat desentralisasi fiskal dapat diperoleh dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah.

### Variabel Mediasi

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh atau dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Variabel mediasi pendapatan asli daerah ini dapat diukur menggunakan perhitungan:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis Part Least Square (PLS) dengan perangkat lunak warpPLS versi 8.0.

## Hasil Penelitian dan Diskusi

### Hasil Penelitian

#### Pengujian Model Fit

Pengujian model fit dalam PLS digunakan untuk menemukan suatu model yang fit dengan data originalnya sehingga dapat menemukan kualitas model. Dalam penelitian ini ukuran fit model yang digunakan hanyalah lima ukuran yaitu *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-squared* (ARS), *Average Adjusted R-squared* (AARS), *Average Block Variance Inflation* (AVIF), dan *Average full collinearity VIF* (AFVIF). APC, ARS, dan AARS digunakan untuk mengukur rata-rata nilai path koefisien, *R-squared*, dan *Adjusted R-squared* yang dihasilkan dalam model. Nilai *P-values* untuk APC, ARS, dan AARS yang direkomendasikan  $\leq 0.05$ . Sedangkan untuk AVIF digunakan untuk menguji masalah *collinearity* di dalam model PLS. Nilai AVIF dan AFVIF yang direkomendasikan harus  $\leq 3.3$  namun  $\leq 5.5$  masih dapat diterima (Ghozali dan Latan, 2017:95). Adapun hasil model fit penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1.** Ukuran Model Fit

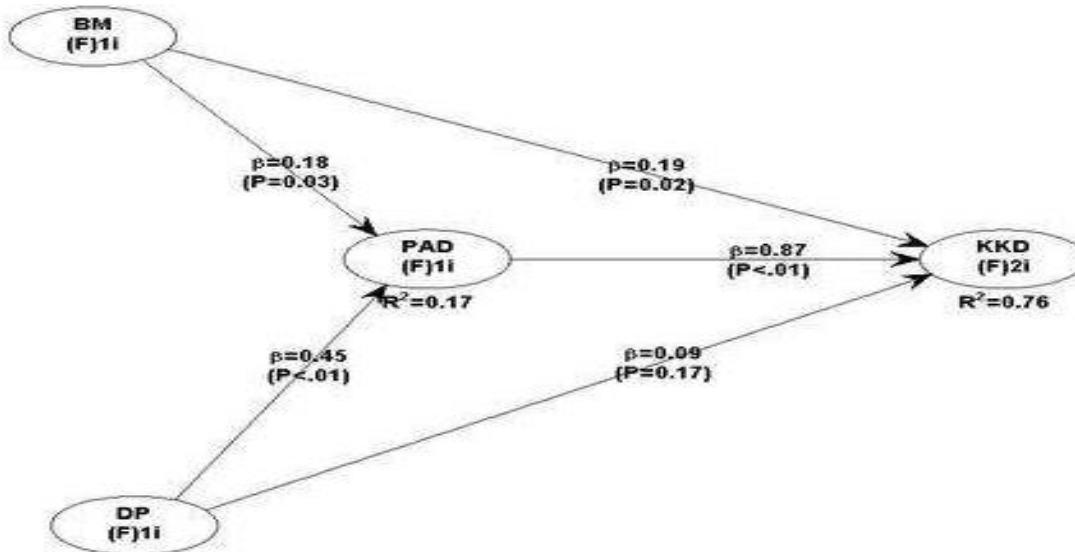
Parameter	Value	P-Value	Hasil
Average Path Coefficient (APC)	0.355, P<0.001	P < 0,05	Model fit
Average R-squared (ARS)	0.464, P<0.001	P < 0,05	Model fit
Average Adjusted R-squared (AARS)	0.443, P<0.001	P < 0,05	Model fit
Average block VIF (AVIF)	1.297	Acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$	Model fit
Average full collinearity VIF (AFVIF)	2.202	Acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$	Model fit

Sumber : Hasil WarpPLS, 2025

Berdasarkan output model fit pada Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa *Average Path Coefficient* (APC) = 0,355,  $p < 0,001$ , *Average R-squared* (ARS) = 0,464,  $p < 0,001$ , *Average adjusted R-squared* (AARS) = 0,443,  $p < 0,001$ , *Average block VIV* (AVIF) = 1,297 (dapat diterima jika  $\leq 5$ , idealnya  $\leq 3,3$ ) dan *Average full collinearity VIF* (AFVIF) = 2,202 (dapat diterima jika  $\leq 5$ , idealnya  $\leq 3,3$ ). Nilai AVIF dan AFVIF sebagai indikator adanya multikolinearitas harus kurang dari 5. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka model penelitian ini adalah fit.

### Pengujian Model Struktural

Analisis model struktural menggunakan WarpPLS 8.0 berdasarkan hasil pengukuran dengan model persamaan struktural secara lengkap dapat dijelaskan pada **Gambar 1** sebagai berikut:



Berdasarkan gambar 1, struktur model tersebut maka dilakukan pengujian *inner model* dan dapat diperoleh hasilnya yang dapat dilihat pada Gambar 1. Pengujian *inner model* ini digunakan juga untuk menguji hipotesis penelitian. Adapun untuk hasil nilai *R-squared* serta nilai *Q-squared* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian *Latent Variable Coefficients*

	BM	DP	PAD	KKD
<i>R-squared</i>			0.170	0.758
<i>Adjusted R-squared</i>			0.141	0.745
<i>Q-squared</i>			0.297	0.676

Sumber : Hasil WarpPLS, 2025

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai *R-squared* untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.170 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel Belanja Modal (BM) dan Dana Perimbangan (DP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 17,0% dan sisanya sebesar 83,0% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Dalam hal ini, model struktural penelitian ini termasuk dalam kategori lemah. Dimana nilai *R-squared* sebesar 0,170 lebih kecil dari 0,25 (Kock, 2021). Sedangkan nilai *R-squared* untuk variabel Kinerja Keuangan Daerah (KKD) sebesar 0.758 dimana memiliki arti bahwa pengaruh variabel Belanja Modal (BM) dan Dana Perimbangan (DP) dengan mediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah (KKD) adalah sebesar 75,80% dan sisanya 24,20% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Dalam hal ini, model struktural

penelitian ini termasuk dalam kategori kuat. Dimana nilai R-squared sebesar 0,758 lebih besar dari 0,75 (Kock, 2021). Untuk nilai *Q-squared* yang dihasilkan oleh variabel endogen adalah lebih besar dari 0 yang berarti bahwa model mempunyai *predictive relevance*.

### Pengujian Hipotesis

Dari hasil pengujian *inner model* atau pengujian model struktural dapat diperoleh nilai koefisien regresi dan signifikansi dari masing-masing hubungan langsung antar variabel penelitian yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang dipilih dalam penelitian ini. Adapun nilai koefisien serta signifikansi hubungan langsung antar variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Nilai Koefisien Antar Variabel

Hubungan Antar Variabel	Path Coefficients	P-Values
Belanja Modal – Pendapatan Asli Daerah	0.179	0.027
Dana Perimbangan – Pendapatan Asli Daerah	0.449	<0.001
Belanja Modal – Kinerja Keuangan Daerah	0.190	0.021
Dana Perimbangan – Kinerja Keuangan Daerah	0.087	0.172
Pendapatan Asli Daerah – Kinerja Keuangan Daerah	0.870	<0.001

Sumber : Hasil WarpPLS, 2025

Berdasarkan Tabel 3 nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Belanja Modal (BM) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,179 dan nilai signifikansi *P-values* sebesar 0.027. Dengan koefisien bernilai positif dan *p-values* < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maksud dari arah positif adalah apabila Belanja Modal semakin naik maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila Belanja Modal menurun maka Pendapatan Asli Daerah menurun. Sehingga berdasarkan hasil tersebut hipotesis Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.

Besarnya nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Dana Perimbangan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,449 dengan nilai signifikansi *P-values* < 0,001. Koefisien tersebut bernilai positif dan nilai signifikansi dibawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan arah positif. Dimana semakin meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima maka semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah. Dan sebaliknya semakin menurun Dana Perimbangan yang diterima semakin menurun pula Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hipotesis Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima.

Selanjutnya besarnya nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah sebesar 0,190 dengan nilai signifikansi *P-values* 0,021. Koefisien tersebut bernilai positif dan nilai signifikansi dibawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan arah positif. Dimana semakin meningkatnya Belanja Modal maka semakin meningkat pula Kinerja Keuangan Daerah. Dan sebaliknya semakin menurun Belanja Modal semakin menurun pula Kinerja Keuangan Daerah. Sehingga hipotesis Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dapat diterima.

Besarnya nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Daerah sebesar 0,087 dengan nilai signifikansi *P-values* 0,172. Koefisien tersebut bernilai positif namun tidak signifikansi karena diatas dari 0,05. Dengan demikian hipotesis Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah ditolak.

Selanjutnya besarnya nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah sebesar 0,870 dengan nilai signifikansi *P-values* <0,001. Koefisien tersebut bernilai positif dan nilai signifikansi dibawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan arah positif. Dimana semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka semakin meningkat pula Kinerja Keuangan Daerah. Dan sebaliknya semakin menurun Pendapatan Asli Daerah semakin menurun pula Kinerja Keuangan Daerah. Sehingga hipotesis Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dapat diterima.

Selain menguji pengaruh langsung antar variabel, penelitian ini juga menguji ada atau tidaknya efek mediasi. Pengujian pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi dilakukan dengan melakukan estimasi indirect effect serta harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor dengan mediator, mediator dengan criterion, dan prediktor dengan criterion.

Besarnya pengaruh signifikan hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui mediasi Pendapatan Asli Daerah adalah 0,155 dengan *P-values* 0,009 sehingga hipotesis Pendapatan Asli Daerah memediasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah diterima. Begitu juga besarnya pengaruh signifikan hubungan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui mediasi Pendapatan Asli Daerah adalah 0,391 dengan *P-values* <0,001 sehingga hipotesis Pendapatan Asli Daerah memediasi hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Daerah diterima.

## **Diskusi**

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Belanja Modal (BM) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,179 dan nilai signifikansi *P-values* sebesar 0.027. Dengan koefisien bernilai positif dan *p-values* < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maksud dari arah positif adalah apabila Belanja Modal semakin naik maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila Belanja Modal menurun maka Pendapatan Asli Daerah menurun. Sehingga berdasarkan hasil tersebut hipotesis Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.

Temuan ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang memandang pemerintah daerah sebagai pengelola (pelayan) yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya publik secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Davis et al., 1997). Dalam konteks penelitian ini, alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah Maluku dan Maluku Utara mencerminkan peran *stewardship* dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan basis ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai pelayan yang baik, pemerintah daerah menggunakan belanja modal sebagai instrumen strategis untuk memperluas basis penerimaan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dari perspektif *Public Expenditure Theory*, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa belanja modal memiliki efek multiplier terhadap perekonomian daerah (Musgrave, 1959). Investasi pemerintah daerah dalam bentuk infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi, gedung, dan fasilitas publik lainnya menciptakan eksternalitas positif yang merangsang aktivitas ekonomi swasta. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat menurunkan biaya transaksi, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kondisi ini pada

gilirannya akan meningkatkan basis perpajakan daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, yang tercermin dalam peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber PAD lainnya.

Sejalan dengan hasil penelitian Tampubolon dan Ariadi (2023) yang menghasilkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan dengan adanya Belanja Modal berupa pembangunan infrastruktur dapat memicu terjadinya aktivitas masyarakat sehingga memperluas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan infrastruktur yang tepat mampu menjadikan suatu daerah memiliki daya tarik tertentu terhadap investor agar menginvestasikan modalnya di daerah tersebut. Kemudahan akses yang merupakan hasil dari pembangunan inilah faktor utama para investor tertarik untuk melakukan penanaman modal di daerah tersebut.

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Dana Perimbangan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,449 dengan nilai signifikansi P-values < 0,001. Koefisien tersebut bernilai positif dan nilai signifikansi dibawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan arah positif. Dimana semakin meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima maka semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah. Dan sebaliknya semakin menurun Dana Perimbangan yang diterima semakin menurun pula Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hipotesis Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif *Stewardship Theory* yang menekankan bahwa pemerintah daerah sebagai *pelayan* memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Davis et al., 1997). Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) bukan sekadar transfer pasif, melainkan instrumen yang harus dikelola secara strategis untuk mencapai tujuan kemandirian fiskal. Dalam konteks Maluku dan Maluku Utara, pemerintah daerah telah menunjukkan peran *stewardship* yang efektif dengan memanfaatkan dana perimbangan tidak hanya untuk membiayai pengeluaran rutin, tetapi juga untuk menstimulasi aktivitas ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan basis penerimaan PAD. Hal ini mencerminkan orientasi jangka panjang dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dana transfer digunakan sebagai modal awal untuk membangun kapasitas fiskal yang berkelanjutan.

Dari perspektif *Fiscal Federalism Theory*, hasil penelitian ini mengkonfirmasi fungsi korektif dan stimulatif dari sistem transfer fiskal vertikal (Oates, 1999). Teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa dana perimbangan dirancang untuk mengatasi ketimpangan fiskal horizontal antar daerah (*fiscal equalization*) sekaligus memberikan stimulus bagi daerah untuk meningkatkan upaya fiskal (*fiscal effort*). Koefisien yang signifikan dan positif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan telah berfungsi melampaui peran tradisionalnya sebagai penutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Dana perimbangan justru berperan sebagai katalis yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan lokal. Mekanisme ini dapat terjadi melalui beberapa jalur: pertama, dana perimbangan membiayai infrastruktur dasar yang membuka akses ekonomi baru; kedua, dana perimbangan memperkuat kapasitas administratif pemungutan pajak dan retribusi daerah; ketiga, dana perimbangan menciptakan

*multiplier effect* dalam perekonomian lokal yang memperluas basis perpajakan. Dalam konteks daerah kepulauan seperti Maluku dan Maluku Utara yang menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal awal dan tantangan geografis, dana perimbangan menjadi instrumen vital untuk membangun fondasi ekonomi yang diperlukan guna meningkatkan PAD. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa sistem transfer fiskal di Indonesia telah berhasil menciptakan insentif positif (*positive spillover*) bagi pemerintah daerah untuk tidak bergantung sepenuhnya pada transfer, melainkan menggunakannya sebagai *leverage* untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.

Sejalan dengan hasil penelitian Muhammad (2021) yang menghasilkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ini dikarenakan transfer dari pusat memang digunakan sebagaimana tujuan awal transfer diberikan. Ketika transfer berfungsi dan digunakan sesuai dengan tujuannya, maka transfer akan berdampak baik pada perekonomian daerah tersebut sehingga pada akhirnya juga meningkatkan realisasi pajak suatu daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah sebesar 0,190 dengan nilai signifikansi *P-values* 0,021. Koefisien tersebut bernilai positif dan nilai signifikansi dibawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan arah positif. Dimana semakin meningkatnya Belanja Modal maka semakin meningkat pula Kinerja Keuangan Daerah. Dan sebaliknya semakin menurun Belanja Modal semakin menurun pula Kinerja Keuangan Daerah. Sehingga hipotesis Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dapat diterima.

Temuan ini mengkonfirmasi premis fundamental *Stewardship Theory* bahwa pemerintah daerah sebagai *pelayan* yang bertanggung jawab akan mengalokasikan sumber daya publik pada investasi produktif yang menghasilkan dampak jangka panjang terhadap kinerja organisasi (Davis et al., 1997). Dalam konteks pemerintahan daerah, belanja modal merepresentasikan komitmen *stewardship* untuk membangun aset jangka panjang yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara lebih efisien dan efektif. Alokasi belanja modal yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan fasilitas publik lainnya mencerminkan orientasi jangka panjang pemerintah daerah Maluku dan Maluku Utara dalam meningkatkan kinerja keuangan. Hubungan positif antara belanja modal dan kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menjalankan peran *stewardship* dengan mengutamakan kepentingan kolektif masyarakat melalui investasi yang terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*).

Dari perspektif *Fiscal Decentralization Theory*, hasil penelitian ini menguatkan argumen bahwa otonomi fiskal memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas belanja yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Oates, 1999). Teori desentralisasi fiskal menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi superior (*information advantage*) tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Dengan otonomi fiskal, pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja modal pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak maksimal terhadap kinerja keuangan daerah. Koefisien positif yang signifikan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Maluku dan Maluku Utara telah memanfaatkan

keunggulan informasi ini untuk mengalokasikan belanja modal secara tepat sasaran. Kinerja keuangan yang meningkat sebagai respons terhadap belanja modal menunjukkan bahwa investasi infrastruktur telah berkontribusi pada peningkatan rasio efektivitas PAD dan derajat desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi karena infrastruktur yang terbangun memperluas basis ekonomi daerah, meningkatkan aksesibilitas layanan publik, dan pada akhirnya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Dalam konteks daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks, belanja modal menjadi instrumen kritis untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini membatasi kinerja keuangan daerah, sekaligus mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal berupa kemandirian dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Sejalan dengan hasil penelitian Digdowiseiso et al. (2022) yang menghasilkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi Belanja Modal yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, maka akan semakin tinggi juga Kinerja Keuangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah. Tingginya Belanja Modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah akan berdampak pada peningkatan fasilitas dan potensi daerah yang kemudian akan meningkatkan penerimaan daerah serta mendorong tercapainya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik.

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Daerah sebesar 0,087 dengan nilai signifikansi *P-values* 0,172. Koefisien tersebut bernilai positif namun tidak signifikan karena di atas dari 0,05. Dengan demikian hipotesis Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah ditolak.

Temuan tidak signifikan ini memberikan perspektif yang menarik untuk dikaji melalui lensa *Stewardship Theory*. Meskipun pemerintah daerah berperan sebagai pelayan yang mengelola dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana transfer ini belum secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa dana perimbangan lebih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja operasional dan rutin (*recurrent expenditure*) dibandingkan investasi strategis yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal jangka panjang. Dari perspektif *stewardship*, temuan ini mengisyaratkan perlunya evaluasi terhadap bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi kepengurusan dalam mengalokasikan dana transfer. Orientasi jangka pendek yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan operasional daripada investasi produktif dapat menjelaskan mengapa dana perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap indikator kinerja keuangan yang diukur melalui rasio efektivitas PAD dan derajat desentralisasi fiskal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran *pelayan* pemerintah daerah dalam konteks dana perimbangan masih perlu diperkuat agar dana transfer dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemandirian dan kinerja keuangan daerah.

Dari perspektif *Fiscal Federalism Theory*, hasil tidak signifikan ini sebenarnya mengkonfirmasi salah satu kritik terhadap sistem transfer fiskal vertikal, yakni potensi terjadinya *flypaper effect* dan *fiscal laziness* (Driessen & Hughes, 2020). Teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap dana transfer dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya pemungutan pendapatan sendiri (*fiscal effort*). Dalam konteks penelitian ini, dana perimbangan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah mengindikasikan bahwa transfer dari pemerintah pusat belum mampu menciptakan efek stimulus yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan: pertama,

dana perimbangan cenderung digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai belanja pegawai yang bersifat wajib (*mandatory spending*), sehingga tidak tersisa ruang fiskal yang cukup untuk investasi produktif; kedua, adanya kemungkinan *substitution effect* dimana dana perimbangan justru menggantikan upaya daerah dalam meningkatkan PAD, bukan melengkapinya (*complementary effect*); ketiga, sistem alokasi dana perimbangan yang belum sepenuhnya berbasis kinerja (*performance-based allocation*) dapat mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa desain sistem transfer fiskal perlu diperbaiki agar dapat mendorong pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi juga aktif meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD dan perbaikan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks Maluku dan Maluku Utara yang masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi, temuan ini menjadi sinyal penting perlunya reformasi kebijakan transfer fiskal yang lebih berorientasi pada pencapaian kemandirian dan akuntabilitas keuangan daerah.

Sejalan dengan hasil penelitian Ramadani & Muslimin (2022) yang menghasilkan bahwa Dana perimbangan tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan dirancang untuk menyamakan kapasitas fiskal di seluruh wilayah, tetapi alokasinya mungkin tidak secara langsung meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini sering digunakan untuk menutupi biaya operasional dasar daripada untuk mendorong efisiensi keuangan atau pertumbuhan.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien hubungan variabel antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah sebesar 0,870 dengan nilai signifikansi *P-values* <0,001. Koefisien tersebut bernilai positif dan nilai signifikansi dibawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan arah positif. Dimana semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka semakin meningkat pula Kinerja Keuangan Daerah. Dan sebaliknya semakin menurun Pendapatan Asli Daerah semakin menurun pula Kinerja Keuangan Daerah. Sehingga hipotesis Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dapat diterima.

Temuan ini merupakan konfirmasi empiris yang kuat terhadap *Stewardship Theory* dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Koefisien yang sangat tinggi (0,870) menunjukkan bahwa PAD bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan indikator fundamental dari kualitas *stewardship* pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah berhasil meningkatkan PAD, hal ini mencerminkan keberhasilan mereka dalam menjalankan fungsi kepengurusan secara efektif melalui optimalisasi potensi lokal, perbaikan sistem administrasi perpajakan dan retribusi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Tingginya pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah mengindikasikan bahwa pelayan yang baik tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan dari transfer pemerintah pusat, tetapi aktif mengembangkan kapasitas fiskal internal daerah. Dalam konteks Maluku dan Maluku Utara, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mampu meningkatkan PAD telah berhasil menjalankan amanah *stewardship* dengan membangun kemandirian fiskal, yang tercermin dalam peningkatan rasio efektivitas PAD dan derajat desentralisasi fiskal sebagai indikator kinerja keuangan. Hal ini juga menunjukkan akuntabilitas yang tinggi, dimana pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah pusat sebagai pemberi dana transfer, tetapi juga kepada masyarakat lokal yang menjadi sumber utama PAD.

Dari perspektif *Fiscal Capacity Theory*, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kapasitas fiskal merupakan determinan utama kinerja keuangan pemerintah daerah (Ricciuti et al., 2016). Teori kapasitas fiskal menekankan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri merupakan prasyarat fundamental bagi tercapainya kemandirian dan keberlanjutan fiskal. Koefisien yang sangat tinggi dan signifikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berfungsi sebagai tulang punggung (*backbone*) kinerja keuangan daerah. Secara teoretis, hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme: pertama, peningkatan PAD secara langsung memperbaiki rasio kemandirian fiskal daerah, yang merupakan salah satu indikator kunci kinerja keuangan; kedua, PAD yang tinggi memberikan fleksibilitas fiskal (*fiscal flexibility*) bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai prioritas lokal tanpa terlalu bergantung pada kondisionalitas dana transfer; ketiga, peningkatan PAD mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal dan efektivitas kebijakan fiskal daerah, yang keduanya berkontribusi terhadap perbaikan kinerja keuangan secara keseluruhan; keempat, PAD yang stabil dan meningkat mengurangi volatilitas fiskal (*fiscal volatility*) yang sering dialami daerah yang sangat bergantung pada dana transfer. Dalam konteks penelitian ini, temuan bahwa PAD memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja keuangan daerah (dengan koefisien tertinggi dibanding variabel lain) memperkuat argumen bahwa pembangunan kapasitas fiskal internal harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan keuangan daerah. Bagi daerah kepulauan seperti Maluku dan Maluku Utara yang menghadapi tantangan struktural dalam meningkatkan PAD, temuan ini memberikan implikasi penting: investasi dalam pembangunan kapasitas administratif perpajakan, diversifikasi sumber-sumber PAD, dan penciptaan ekosistem ekonomi lokal yang produktif merupakan strategi kunci untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal dan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hasil penelitian (Sari & Wati, 2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya.

## **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan pada analisa data, pengujian hipotesis serta pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana peningkatan belanja modal akan meningkatkan PAD, begitu pula sebaliknya. Diterimanya hipotesis ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur melalui belanja modal yang mampu menciptakan eksternalitas positif, memperluas basis ekonomi daerah, dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tampubolon dan Ariadi (2023) serta Hasibuan et al. (2023) yang mengkonfirmasi bahwa belanja modal dapat menarik investasi, membuka peluang ekonomi baru, dan pada gilirannya memperluas sumber-sumber penerimaan PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. (2) Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan PAD, begitu pula sebaliknya. Diterimanya hipotesis ini disebabkan oleh fungsi dana transfer yang tidak hanya menutup kesenjangan fiskal, tetapi juga menciptakan efek stimulus terhadap perekonomian daerah. Sejalan dengan penelitian Muhammad (2021), peningkatan PAD terjadi ketika dana perimbangan digunakan sesuai tujuan awalnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan

meningkatkan kapasitas administratif daerah, sehingga berdampak positif pada perekonomian lokal dan pada akhirnya meningkatkan realisasi pajak daerah. (3) Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dimana peningkatan belanja modal akan meningkatkan kinerja keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Diterimanya hipotesis ini disebabkan oleh alokasi belanja modal yang tinggi berdampak pada peningkatan fasilitas dan potensi daerah, yang kemudian meningkatkan penerimaan daerah serta efektivitas pengelolaan keuangan. Sejalan dengan penelitian Digdowiseiso et al. (2022), semakin tinggi belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah daerah akan semakin tinggi pula kinerja keuangan yang dicapai karena investasi infrastruktur memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan rasio kemandirian serta efektivitas keuangan daerah. (4) Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Ditolaknya hipotesis ini disebabkan oleh alokasi dana perimbangan yang cenderung digunakan untuk menutupi biaya operasional dasar dan belanja pegawai daripada investasi produktif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian Ramadani dan Muslimin (2022), dana perimbangan dirancang untuk menyamakan kapasitas fiskal antar wilayah, namun alokasinya tidak secara langsung meningkatkan kinerja keuangan karena lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin dibandingkan mendorong pertumbuhan kapasitas fiskal. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi *flypaper effect* dimana dana transfer justru mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya fiskal sendiri. (5) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dimana peningkatan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Diterimanya hipotesis ini disebabkan oleh PAD yang merupakan indikator kemandirian fiskal dan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai prioritas lokal tanpa bergantung pada dana transfer. Sejalan dengan penelitian Sari dan Wati (2021), PAD memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja keuangan karena pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, yang secara langsung memperbaiki rasio efektivitas dan kemandirian fiskal. Selain itu, PAD terbukti memediasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah, serta hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal dan dana perimbangan tidak secara langsung meningkatkan kinerja keuangan, melainkan melalui mekanisme peningkatan PAD terlebih dahulu.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk lebih memperhatikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan perluasan basis penerimaan serta melakukan pengawasan dan penelitian lebih mendalam, serta memperhatikan penggunaan belanja modal agar lebih tepat guna mendukung pertumbuhan kinerja keuangan daerah demi tercapainya kemandirian suatu daerah. (2) Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan indikator dari variabel Kinerja Keuangan Daerah dengan menggunakan rasio lainnya agar lebih merefleksikan kondisi Kinerja Keuangan Daerah, selain itu menambahkan informasi besaran jumlah Belanja Modal yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengetahui porsi kegiatan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang suatu daerah.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi

Maluku dan Maluku Utara atas ketersediaan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat berarti dalam keberhasilan penyusunan artikel ilmiah ini.

## Daftar Pustaka

- Anggih, A., Roni, R., & Ernitawati, Y. (2024). The Influence of Original Regional Income, Capital Expenditures, and General Allocation Funds on the Financial Performance of the Regional Government of Brebes Regency for the 2022-2023 Fiscal Year. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.57235/jetish.v3i2.3214>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>
- Digdowniseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1150>
- Driessen, G. A., & Hughes, J. S. (2020). Fiscal Federalism: Theory and Practice. *Fiscal Federalism*.
- Halim, A. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Hasibuan, T., Soleh, A., & Rahman, A. (2023). The Effect Of Capital Expenditure And Local Revenue On Economic Growth In Cities And Regencies In Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.37676/jambd.v2i1.3593>
- Kock, N. (2021). *WarpPLS User Manual: Version 8.0*.
- Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan, PDRB per Kapita, Tax Effort, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/djoe.31596>
- Musgrave. (1959). *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy | Wageningen University and Research Library Catalog*. <https://library.wur.nl/WebQuery/titel/983804>
- Nofrita, M., Rahayu, S., Yudi, Y., & Herawaty, N. (2024). Systematic Literature Review: The Influence of Regional Expenditure and Regional original revenue on Local Government Performance. *OPSearch: American Journal of Open Research*, 3(6), Article 6. <https://doi.org/10.58811/opsearch.v3i6.121>
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Nurjanah. (2025). *Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat>
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Oktavilia, S., Fafurida, F., Rahman, Y. A., & Silvia, R. B. (2020). Improving Regional Fiscal Capacity in Central Java Province Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i2.35094>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah. 6 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
- Ramadani, A. F., & Muslimin, M. (2022). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i1.3710>
- Ricciuti, R., Savoia, A., & Sen, K. (2016). *How Do Political Institutions Affect Fiscal Capacity? Explaining Taxation in Developing Economies*.
- Ronal, M., & Massua, A. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 181–189. <https://doi.org/10.59024/semnas.v1i2.63>
- Santika, I. P., & Adnyana, I. B. M. P. (2022). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Journal of Applied Management Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.51713/jamms.v3i2.54>
- Sari, B. I., & Wati, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Sarmanu. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*. Airlangga University Press. Surabaya
- Silitonga, N. S. et. (2021). The Moderating Effect Of Regional Indpendence On The Effect Of Financing Policies, Capital Expenditure And Transfer Fund Towards The Performance Of Local Governments. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3), 5239–5251.
- Tampubolon, L., & Ariadi, W. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 25–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.151>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2009. Jakarta: Salemba Empat
- Wang, W. (2024). The Impact of Sufficient Infrastructure Investment on Regional Macroeconomy – Taking California High-Speed Rail Project vs LaGuardia Airport Reconstruction Project as Examples. *Highlights in Business, Economics and Management*, 46, 251–257. <https://doi.org/10.54097/a78q6g91>
- Widowati, N., Mulyana, D., & Supriadi, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i3.1252>